BAJAK DAN SEBARKAN SEPERTI HALNYA NEGARA YANG MENYEBARKAN KETAKUTAN MELALUI RKUHP

Bungaali #2 Newsletter

INTRODUKSIONARISME

KANAN-KIRI-ATAS-BAWAH

Hola kawan-kawan. Akhirnya setelah mengalami fase "malas mikir" dan melihat tingkah pola negara menyetujui RKUHP, kami dapat menyelesaikan dan merilis newsletter ini dengan ceria meski kami sadar newsletter ini bisa saja jadi bungkus kacang rebus karena isinya "*totally*" unfaedah :).

Di edisi ini kami fokus membahas KTT G20 yang dilakukan di Bali, dimana hingar-bingar pesta pora yang menghabiskan anggaran hampir Rp 1 M tersebut menyimpan siasat jahat para kapitalis global dalam mempercepat kiamat dunia. selain itu di edisi ini ada artikel tentang omong kosong kendaraan listrik sebagai solusi mencegah perubahan iklim global. Terakhir, kami ucapkan "maturnuwun" kepada Mas Gilang "Propagila" yang mengizinkan kami memakai artworknya untuk dimuat dalam newsletter ini sebagai bentuk pesan bahwa siapapun bisa direpresi oleh RKUHP yang baru disahkan.

Okay cukup ngalor-ngidulnya. Kalian bisa dapatkan newsletter ini pada show Flowerviolence atau mengunduhnya di link bio band sok ngartis Flowerviolence. Silahkan DM Instagram kami atau email ke xflowerviolencex666@gmail.com jika kalian mau kontribusi atau caci maki. Akhirul kata selamat membaca. Cheers.

siasat jahat G20 mewujudkan kiamat global

"In the cabaret of globalization, the state shows itself as a table dancer that strips off everything until it is left with only the minimum indispensable garments: the repressive force".

-Subcomandante Marcos-

Gelaran Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah selesai di laksanakan di Pulau Bali pada tanggal 15 – 16 November 2022. Hingar bingar gelaran tersebut menyisahkan kebanggaan tersendiri bagi para birokrat. Namun gaung gelaran tersebut juga meninggalkan penderitaan dan kesedihan bagi kaum miskin yang makin terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan negara. Bahkan hingar-bingar gelaran tersebut juga makin menimbulkan kesedihan masyarakat di pedalaman Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya yang hutannya dibabat demi sawit, mineral dan embel-embel kemajuan jaman.

Siapakah G20 dan Gerombolannya

Konon Gerombolan G20 terbentuk atas kekecewaan masyarakat internasional

(entah masyarakat internasional yang mana) atas kegagalan G7 dalam mencari solusi atas permasalahan ekonomi global. Dari kegagalan itu muncul pandangan bahwa negara-negara berpendapatan menengah dan negara-negara yang punya pengaruh ekonomi sistemik ikut andil dalam mencari solusi masalah ekonomi global, dan jadilah Group of Twenty atau G20. Pada awalnya forum ini dibentuk sebagai sebuah forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italy, France, Russia dan Uni Eropa. Tujuan dari gerombolan ini adalah membahas kebijakan penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan global. Lalu dalam perkembangannya Managing Director International Fund (IMF) dan Presiden Bank Dunia (WTO) ikut handir dalam forum tersebut. Dan sudah bukan rahasia umum, Ketika 2 lembaga kapitalis global tersebut ikut andil dalam forum Gerombolan 20 tersebut maka agenda-agenda Kapitalisme global ala gombalisasi menyusup dalam setiap sendi kebijakan negara hingga tak tersisa selain kesedihan bagi si miskin dan kerusakan lingkungan.

Globalisasialan

G20 berkelindan dengan globalisasi / neoliberalisme. Globalisasi itu sendiri di Indonesia bagaikan mantra yang dapat menghipnotis semua orang hingga kita dipaksa suka ataupun tidak harus ikut arus ini. Pidato kaum birokrat kita selalu tidak lepas dari pembicaraan globalisasi, bahkan sejak G20 diadakan kata globalisasi, liberalisasi pasar, kemajuan dan konco-konconya makin menggema di Nusantara. Globalisasi atau sering disebut dengan Neoliberalisme selalu diargumenkan oleh para pakar sebagai bentuk kemajuan peradaban, modernitas dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Argument-argumen tersebut dibangun untuk menutupi betapa mudharatnya globalisasi itu sendiri.

Dibawah bendera globalisasi dan neoliberalisme, pasar dan investasi akan dibuka selebar-lebarnya. Dengan dikawal oleh IMF dan WTO, semua hambatan dalam investasi akan dipenggal habis, kekuatan negara dalam melindungi rakyatnya akan dilemahkan atas nama kemudahan investasi, dan hutan akan dibabat habis demi industry ekstraktif. Salah satu contoh produk kemudharatan rezim di bawah bendera globalisasi adalah Omnibus Law. Regulasi yang lahir dari panji-panji kemudahan investasi ini memangkas habis semua bentuk kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya dan lingkungannya. Pendek kata Globalisasi adalah kepanjangan tangan si Kaya agar makin kaya dan si miskin makin miskin. Atau jika boleh meminjam istilah dari David Graeber bahwa "Neoliberalism isn't an economic program - *it's a political program designed to produce*

hopelessness and kill any future alternatives".

Tiga Agenda Setan

Balik lagi ke seputar pelaksanaan G20 atau istilah kerennya Presidensi G20 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia. Dengan mengusung tema yang sok mulia "Recover Together, Recover Stronger" Presidensi G20 mengusung tiga sektor prioritas yaitu "Penguatan Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital dan Transisi Energi". Bagi kami, tiga sektor prioritas itu tidak ubahnya seperti tiga agenda setan dalam melancarkan kiamat global. Coba kita telisik Kembali masing-masing agenda tersebut. Pertama, jika kita bicara penguatan Kesehatan global, maka sepatutnya kita kembali melihat betapa pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih menerpa dunia adalah bentuk ironi dari agenda G20 yang pertama. Pandemi covid-19 kemarin serupa orchestra kapitalis yang menciptakan kelindan antara krisis Kesehatan/virus, krisis iklim, dan krisis ekologi yang mengancam kepunahan manusia dan sekaligus menciptakan penawarnya berupa Vaksin. Orchestra itu tak lain dan tak bukan hanya ditujukan demi akumulasi nilai lebih. Tak salah jika Greta Thunberg pernah mengatakan "Krisis iklim, krisis ekologi dan krisis kesehatan saling terkait. Jutaan telah meninggal karena virus covid-19, zika, ebola, SARS, MERS, HIV karena virus berpindah dari hewan ke manusia. Cara kita memperlakukan alam, menebang hutan, menghancurkan habitat menciptakan kondisi sempurna bagi penyakit lain menyebar dari satu hewan ke hewan lain dan kepada kita".

Sektor prioritas selanjutnya dari presidensi G20 adalah "transformasi digital". Konon terdapat tiga fokus utama untuk mengapai pengembangan transformasi digital. Tiga fokus tersebut adalah kesetaraan akses digital, literasi digital dan lingkungan digital yang aman. Dua fokus pertama berujung pada ekonomi digital. Fokus tersebut seakan "wah" namun sesungguhnya hampa. Kesetaraan akses dan literasi digital adalah doktrin untuk menciptakan masyarakat tontonan yang menghamba pada teknologi beserta perangkat gadgetnya. Umat manusia di pelosok antah berantah hingga kota paling modern sekalipun dipaksa melek dengan teknologi, media sosial, e-commerce/marketplace hingga iklan "catchy" dan kekinian. Dan ujung dari penghambaan itu tak lain dan tak bukan adalah konsumerisme dan akumulasi nilai lebih. Lalu fokus lain untuk mencapai transformasi digital berupa Lingkungan digital yang aman terbebas dari konflik. Tentu tidak. Bagaimana mungkin negara dapat berkoar-koar menciptakan Lingkungan digital yang aman sementara Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pasal karetnya masih berseliweran di negeri ini menghantui dan mengkrimi-

nalisasi siapapun yang berbeda pendapat.

Fokus prioritas terakhir dari presidensi G20 adalah pengembangan transisi energi. Kami melihat pengembangan transisi energi yang diikuti dengan beberapa target seperti pengurangan emisi karbon 290 ton, capaian bauran energi baru terbarukan sebanyak 24% pada tahun 2030 seperti yang digembar-gemborkan oleh presidensi G20 ini hanya gimick belaka. Nyatanya negara tetap memfasilitasi kepentingan oligarki batubara. Pemberian kelonggaran dalam perizinan dalam industry ekstraktif maupun pembangkit berbahan bakar batubara juga masih tampak nyata adanya hingga tak menyisakan apapun terkecuali kesedihan dan kerusakan Lingkungan belaka. Fakta lain dari focus pengembangan transisi energi yang gencar disuarakan dalam G20 adalah masuknya komitmen pendanaan untuk proyek-proyek yang berkedok transisi energi dan pembangunan rendah emisi karbon sebesar kurang lebih USD 20 Miliar atau setara Rp. 310 Trilliun. Dibalik pendanaan yang terlihat baik dan ramah lingkungan ini sesungguhnya meninggalkan kepedi-han untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah yang punya kandungan sumber energi maupun mineral seperti Kalimantan, Sulawesi dan daerah-daerah lain. Daerah tempat tinggal mereka dieksploitasi habis-habisan dan hanya meninggalkan bencana dan pencemaran lingkungan.

Bakar Uang Untuk Gelaran G20 dan Beberapa Pembungkaman

Sudah bukan rahasia umum lagi jika gelaran G20 menghabiskan biaya yang tak kecil. Dari berbagai sumber dijelaskan, pelaksanaan G20 yang dilakukan di Bali menghabiskan biaya sebesar Rp. 674 miliar. Dan biaya tersebut diambilkan dari APBN. Dana sebesar itu digunakan untuk memoles kawasan hutan Mangrove Tahura, Ngurah Rai, perservasi jalan di Nusa Dua-Jimbaran-Uluwatu, penataan lanskap bundaran dekat Bandara Ngurah Rai Venue, serta pedestrian di sekitarnya dan fasilitas infrastruktur lainnya untuk gelaran G20. Bisa dibayangkan hanya untuk pergelaran yang dilakukan 2 hari tersebut uang rakyat yang bersumber dari APBN dibakar habis tanpa menghasilkan capaian apapun untuk rakyat selain penderitaan dan pencemaran Lingkungan. Kami rasa ketimbang membuang uang sebanyak itu lebih baik biaya tersebut dialokasikan untuk menambah subsidi BBM bagi rakyat.

Selain buang-buang uang, gelaran G20 juga menjadi ajang pembungkaman dan

represi oleh negara kepada rakyatnya. Pembatasan ruang demokrasi sangat terasa ketika para petinggi negara berkumpul dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Berbagai aktivitas rakyat dibatasi dan kritik terhadap G20 disensor. Beberapa waktu lalu aksi damai yang dilakukan oleh kelompok pesepeda dengan cara bersepeda dari Jakarta menuju Bali sambil membawa pesan terkait Lingkungan diintimidasi dan direpresi habis-habisan. Bahkan aktivitas seni (pagelaran music, seni, poster dan zine) yang dilakukan kawan-kawan Bali yang tidak ada kaitan dengan G20 direpresi. Semua itu dilakukan demi kelancaran gelaran KTT G20. Negara benar-benar phobia terhadap kritik dan menutup ruang demokrasi demi event yang tidak menghasilkan apa-apa buat rakyatnya.

Mengapa Kami Menentang G20 dan Apa yang Kita Inginkan Sebagai gantinya?

Kami menentang G20 karena kami percaya bahwa hanya inisiatif akar rumput horizontal yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi umat manusia. Krisis keuangan, kekacauan iklim, kekerasan etnis, dan represi negara adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari pasar dan pemerintah yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang yang paling kejam. Daripada kebijakan ini atau itu yang dihasilkan dari G20, maka makanan gratis, perumahan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah hal utama ketimbang janji manis G20. Mengambil tindakan melawan G20 dan melawan kapitalisme global mengamankan ruang untuk inisiatif akar rumput yang inklusif dalam imajinasi populer adalah alternatif dari dominasi dunia oleh elit keuangan dan politik.

Sebagai pengganti kekuatan hierarkis para pemimpin G20 dan antek-anteknya, kami kabarkan jaringan horizontal sedunia berdasarkan otonomi, solidaritas, dan saling membantu. Kami harap dapat menggunakan ini untuk mempertahankan diri dari semua calon penguasa saat kami berupaya menciptakan fondasi untuk cara hidup yang lain. Menolak G20 hanyalah satu bagian kecil dari proyek yang jauh lebih besar mencakup penciptaan sumber daya bersama untuk kepentingan semua. Karena kami ingin hidup menciptakan surga di dunia yang jauh dari kerakusan kapitalisme yang kejam..

Dalam satu atau dua tahun belakangan ini gembar-gembor pencegahan perubahan iklim dengan penggunaan kendaraan listrik terdengar kencang di Indonesia. Untuk menggaungkan penggunaan kendaraan listrik Presiden Jokowi sampai menerbitkan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang mengatur pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka tak salah jika Pak Menteri BUMN pamer mempunyai mobil listrik Hyundai. Bahkan penggunaan kendaraan listrik jadi gimmick tersendiri di KTT G20.

Sebelum kita berbicara lebih jauh perihal kendaraan listrik, kita perlu mengetahui apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim tidak lepas dari fenomena alam efek rumah kaca yang disebabkan meningkatnya gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC dll) di atmosfer sehingga menimbulkan pemanasan global. Fenomena ini mengakibatkan peningkatan suhu, mencairnya es di kutub utara dan selatan, meningkatnya tinggi air laut dan perubahan ekosistem lainnya. Mengutip Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), gas rumah kaca dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah cair, penggunaan listrik dan produksi sampah. Emisi karbon (CO2) punya peran paling besar dalam perubahan iklim. Dan emisi karbon ini dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil (batubara, minyak, gas dll) baik untuk pembangkit listrik maupun kendaraan.

Lalu apakah benar penggunaan kendaraan listrik jadi solusi pencegahan iklim? Klaim tersebut kami rasa tidak benar. Sebagai gambaran, teknologi kendaraan listrik hanya mengandalkan baterai sebagai sumber tenaga penggerak motor listrik di roda yang membutuhkan fasilitas *charging* untuk pengisian daya listrik. Nah ditinjau dari tingkat emisi, kendaraan listrik ini memiliki gas buang yang paling rendah emisinya hingga nol karena tidak menggunakan mesin bermotor bakar. Namun selama sumber listrik yang digunakan untuk *charging* dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan dasar fosil (batubara) maka mencegah perubahan iklim adalah

bullshit. Jejak karbon akan tetap dihasilkan dari pengoperasian kendaraan listrik tersebut dan degradasi iklim tetap terjadi.

Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu digaris bawahi perihal asal-muasal baterai lithium dari kendaraan listrik tersebut. Baterai lithium sebagai sumber energi kendaraan listrik terbuat dari bahan baku mineral, antara lain Cobalt (Co) dan Nickel (Ni). Cobalt adalah logam yang diperoleh saat menambang mineral nikel, timah, perak, tembaga, dan besi. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki kandungan nickel terbesar dibandingkan dengan negara lainnya. Cadangan nickel Indonesia sebesar 72 juta ton banyak tersebar di Sulawesi, Halmahera, Maluku dll. Walhasil di area tersebut banyak perusahaan tambang berlomba-lomba meledakkan batuan dan mengeruk bumi demi mendapatkan nickel. Aktivitas ekstraktif ini meninggalkan kerusakan lingkungan maha dahsyat seperti deforestasi, pencemaran limbah tailing ke badan air sungai atau laut, pencemaran udara, bencana tanah longsor, banjir dll.

Diluar isu Lingkungan, kami juga mengutip apa yang disampaikan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melalui laman Jatam.org tentang "Inpres Mobil Listrik : Manjakan Oligarki, Korbankan Rakyat". Kami rasa, apa yang ditulis di laman tersebut hampir dipastikan benar adanya. Penggunaan kendaraan listrikmenyebabkan banyak elit politik terlibat langsung dan tidak langsung dalam bisnis pertambangan nikel dan ekosistem kendaraan listrik. Sebut saja Luhut dan Nadiem. Mereka melalui PT. TBS Energi Utama Tbk (Toba) dan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mendirikan perusahaan bernama Electrum yang sudah menjalin kerja sama dengan Pertamina dan Gogoro Inc, (produsen kendaraan listrik asal Taiwan). Lalu ada Sandiaga Uno, lewat perusahaannya PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), menambah kepemilikan sahamnya di PT. Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan merger dengan Tsingshan Group Limited mendirikan perusahaan bernama PT. Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) untuk mengolah sisa bijih mineral dari tambang tembaga Wetar menjadi bahan baku baterai. Nama-nama diatas merupakan *circle* terdekat dari pemerintahan saat ini. Dengan demikian mobil listrik adalah kado istimewa dari Presiden Jokowi untuk oligarki, dimana sebagian penerima manfaatnya ada di lingkaran istana negara.

Lalu apakah kita akan tetap mengatakan bahwa kendaraan listrik ini sebagai satu-satunya solusi pencegahan perubahan iklim.? Tentu tidak..!! ya Kalau kata teman kami penggiat sepeda, "*asline sepedaan karo mlaku iku solusi climate change tenanan duduk malah mobil listrik*". Kami pun jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh Karl Marx bahwa "manusia hidup dari alam (alam adalah tubuhnya) dan ia mesti menjalin dialog terus-menerus dengan alam apabila ia tak ingin mati". Jadi secara implisit dapat diartikan "stop membabat hutan dan mengeruk perut bumi serta tolak agenda-agenda kapitalisme dalam merusak lingkungan dan memperkaya diri. *Lets Green The World And Smash Capitalism* - Flowerviolence

Pulang malam. Habis bikin gigs punk. Lirik band kamu penuh kritik. Musik kamu penuh kebisingan. Zine yg kamu bawa berisi wacana kebebasan dan melawan pembangunan. Emblem di jaket kamu identik dg ideologi anti-otoritarian. Totebag kamu berisi barang lapakan punk ya? Coba kami cek!

PUNK BISA KENA!

KARENA KEKUASAAN TIDAK SUKA PUNK!